

NOTA DINAS
NOMOR 103/IJ-IND/PR/VII/2026

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Plt. Inspektur Jenderal
Hal : Laporan PP39 Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 14 Juli 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini kami laporkan bahwa capaian realisasi penyerapan anggaran Pagu pada Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan II tahun 2026, yaitu Rp21.271.880.624,- atau sebesar 64,93% dari total pagu Rp Rp32.763.520.000,-. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada Triwulan II (April - Juni) 2026 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Zona Integritas untuk satuan kerja IFPK Kendal, BDI Makasar, BDI Padang, BDI Surabaya, BDI Denpasar, BDI Yogyakarta, dan SMK SMTI Banda Aceh;
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Unit Kerja Eselon I Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
3. Monev Pengadaan melalui *e-Catalogue* Pada Pusat Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Ilmate, BBIA dan AKA Bogor, Pusat BSKJI, BBSPJIKB, BDI Yogyakarta, dan SMK-SMTI Yogyakarta;
4. Koordinasi pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian;
5. Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal;
6. Koordinasi Pelaksanaan Tim Penilai Internal ZI dan Entry Meeting Evaluasi ZI Tahun 2026;

7. Koordinasi Pelaksanaan Klarifikasi Penilaian dan Konfirmasi Evaluasi Zona Integritas;
8. Koordinasi penyusunan/pemilihan rencana aksi tindak lanjut hasil survei penilaian integritas (SPI) Kementerian Perindustrian tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

 PIt. INSPEKTUR JENDERAL,

M RUM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Inspektur.

LAPORAN PP39

TRIWULAN II 2026



INSPEKTORAT
JENDERAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan II Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan tujuan untuk melihat realisasi fisik dan anggaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian periode triwulan II tahun 2026.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Juli 2026

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



M. RUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program	1
1.3 Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	11
2.1 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026	11
2.2 Sasaran Program Tahun Anggaran 2026	14
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	18
3.1 Hasil yang Telah Dicapai	18
3.2 Analisa Capaian Kinerja	21
3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	45
3.4 Langkah Tindak Lanjut	45
BAB IV PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Pada Inspektorat Jenderal.....	3
Tabel 2 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal	11
Tabel 3 Indikator Tujuan Inspektorat Jenderal	14
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026	14
Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pagu Efektif	19
Tabel 6 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Inspektorat Jenderal	20
Tabel 7 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal	20
Tabel 8 Target dan Realisasi Output Inspektorat Jenderal Tahun 2026	21
Tabel 9 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal.....	22
Tabel 10 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026	26
Tabel 11 Hasil Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian Tahun 2026	38
Tabel 12 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2026	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Inspektorat Jenderal.....	2
Gambar 1. 2 Bagan Organisasi Inspektorat I	5
Gambar 1. 3 Bagan Organisasi Inspektorat II	6
Gambar 1. 4 Bagan Organisasi Inspektorat III	7
Gambar 1. 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2026 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

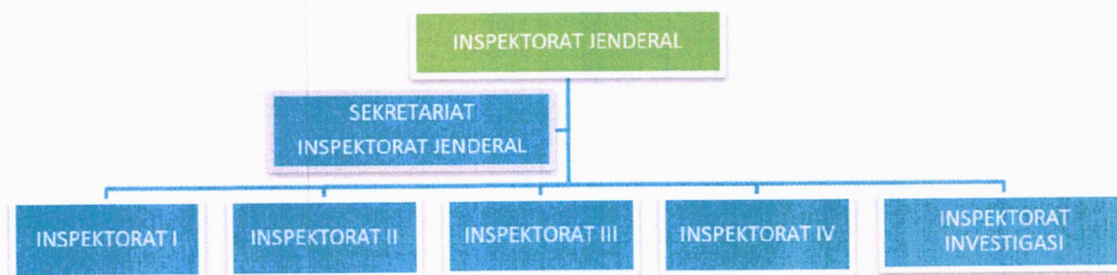
1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III;
- Inspektorat IV; dan
- Inspektorat Investigasi

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksana evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;

- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Pada Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
1	Kepala Bagian Umum	1	PNS
2	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	2	PNS
3	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	2	PPPK
4	Fungsional Arsiparis Terampil	3	PNS & PPPK
5	Fungsional Analis SDMA Ahli Madya	1	PNS
6	Fungsional Analis SDMA Ahli Pertama	2	PPPK
7	Fungsional Auditor Ahli Madya	1	PNS
8	Fungsional Auditor Ahli Pertama	2	PNS

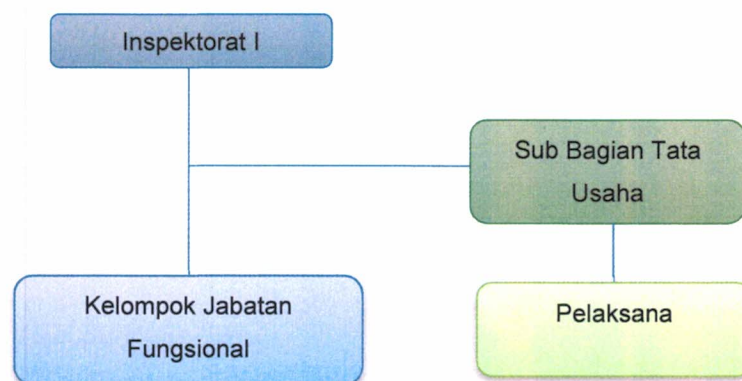
No	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)	Keterangan
9	Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda	1	PNS
10	Fungsional Analis Anggaran Ahli Pertama	1	PNS
11	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	PNS
12	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	PNS
13	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil	2	PNS
14	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	PNS
15	Fungsional Perencana Ahli Pertama	4	PNS & PPPK
16	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	2	PPPK
17	Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama	2	PPPK
18	Penelaah Teknis Kebijakan	2	PNS
19	Penata Layanan Operasional	3	PNS
20	Pengelola Layanan Operasional	6	PNS
21	Operator Layanan Operasional	3	PPPK
22	Pengadministrasi Perkantoran	3	PPPK
23	Dokumentalis Hukum	1	PNS
24	PPNPN	5	
Total Pegawai Sekretariat Itjen		52 orang	

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan pelaksana
- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Sumber Daya Manusia pada Inspektorat I berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan detail sebagai berikut:
 - a. Auditor Utama : 1 Orang;
 - b. Auditor Madya : 4 Orang;
 - c. Auditor Muda : 6 Orang;
 - d. Auditor Pertama : 6 Orang;
 - e. Auditor Terampil : 1 Orang;
 - f. Arsiparis Terampil : 1 Orang;
 - g. Kasubag TU : 1 Orang.



Gambar 1. 2 Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha

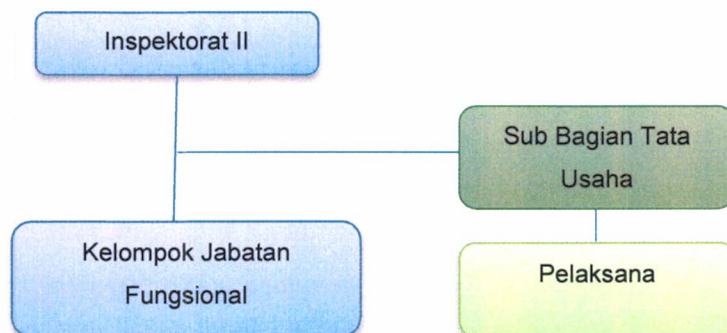
- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat II berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 4 Orang;
- c) Auditor Muda : 6 Orang;
- d) Auditor Pertama : 3 Orang;
- e) Auditor Terampil : 3 Orang;
- f) Kasubag TU : -
- g) Pelaksana : 1 orang.



Gambar 1. 3 Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jendral, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Inspektorat III terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urus rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

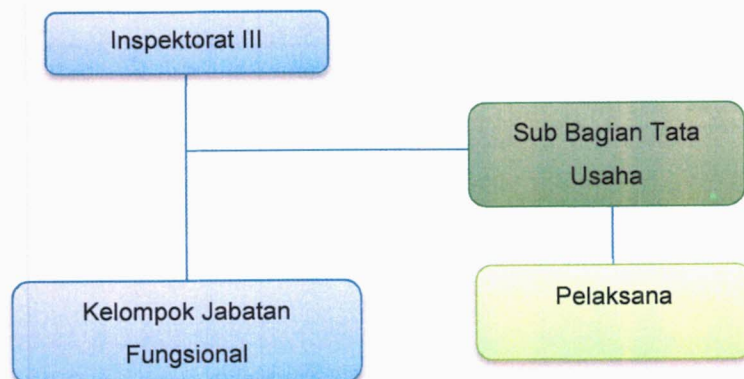
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat III berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 4 Orang;
- c) Auditor Muda : 6 Orang;
- d) Auditor Pertama : 3 Orang;
- e) Auditor Terampil : 2 Orang;
- f) Kasubag TU : -
- g) Pelaksana : 1 orang.

Arsiparis



Gambar 1. 4 Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal IndustriAgro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Inspektorat IV terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

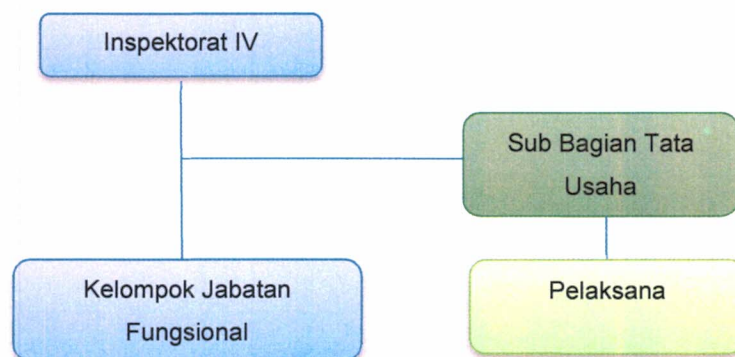
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat IV berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Madya : 4 Orang;
- b) Auditor Muda : 7 Orang;
- c) Auditor Pertama : 5 Orang;
- d) Kasubag TU : 1 orang;
- e) Pelaksana : 1 orang.

Arsiparis



Gambar 1. 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV

5) Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
- b. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat;
- f. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;
- h. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus menteri dan/atau inspektur jenderal;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada inspektorat investigasi; dan;
- j. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja inspektorat investigasi.

Inspektorat Investigasi terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Investigasi berjumlah 11 (sebelas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Madya : 2 Orang;
- b) Auditor Muda : 3 Orang;
- c) Auditor Pertama : 4 Orang;
- d) Kasubag TU : 1 Orang;
- e) Outsourcing : 1 Orang.

Arsiparis

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

2.1 Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Dukungan Manajemen", dengan Visi dan Misi sejalan dengan Visi, Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi

1. Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis SDA dan pengembangan Industri prioritas;
2. Menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. Mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. Mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan;
5. Meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

3. Tujuan

"Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian".

Program Dukungan Manajemen pada Inspektorat Jenderal Tahun 2026 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp32.763.520.000,- dengan program dan kegiatan pada Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal

No	Program	Kegiatan	Output
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	- Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Reviu - Layanan Monitoring dan Evaluasi - Layanan Konsultasi dan Pengawasan	- 1 Layanan - 194 Laporan - 1 Layanan - 1 Layanan - 38 Laporan - 38 Laporan - 12 Laporan

No	Program	Kegiatan	Output
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Reviu - Layanan Monitoring dan Evaluasi - Layanan Konsultasi dan Pengawasan	- 1 Layanan - 4 Laporan - 1 Layanan - 1 Layanan - 16 Laporan - 12 Laporan - 1 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Reviu - Layanan Monitoring dan Evaluasi - Layanan Konsultasi dan Pengawasan	- 1 Dokumen - 1 Layanan - 10 Laporan - 1 Layanan - 1 Layanan - 57 Laporan - 27 Laporan - 28 Laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Reviu - Layanan Monitoring dan Evaluasi - Layanan Konsultasi dan Pengawasan	- 1 Layanan - 1 Layanan - 6 Laporan - 1 Layanan - 1 Layanan - 4 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan
5	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal	- 1 Layanan - 1 Layanan - 4 Laporan

No	Program	Kegiatan	Output
		- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Monitoring dan Evaluasi - Layanan Konsultasi dan Pengawasan	- 1 Layanan - 1 Layanan - 3 Laporan - 1 Laporan - 2 Laporan
6	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	- Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Teknologi - Layanan Protokoler - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Manajemen Kinerja - Layanan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	- 31 Unit - 193 Unit - 1 Layanan - 1 Layanan - 12 Layanan - 5 Paket - 137 Orang - 1 Layanan - 1 Layanan - 1 Layanan - 10 Laporan

*Sumber: Data POK Revisi 6 Tahun 2026

2.2 Sasaran Program Tahun Anggaran 2026

Adapun Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2026 yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Indikator Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Level kapabilitas (IACM) APiP Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> dan penilaian dari BPKP	Nilai	3,3

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam Sasaran Program dan Indikator Kinerjanya yang diukur melalui Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Kementerian Perindustrian *)IKU	0,45 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,45% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *) IKU	62%	Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				sesuai rekomendasi dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah Sesuai Rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran T-1 dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran T-1 C = Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun T-2 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun T-2
		1.3 Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *) IKU	20%	Jumlah satker yang memperoleh predikat WBK dan WBM dibagi dengan total satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBM dikali 100%
		1.4 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi tim auditor Inspektorat Jenderal
		1.5 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	81,4	IP ASN dihitung oleh tim kepegawaian masing-masing

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				unit sesuai Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019
		1.6 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	73	Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian
		1.7 Tingkat Penerapan SPBE	78%	Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri LKE Tingkat Penerapan SPBE
		1.8 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,4	Nilai IKPA disusun atas 13 indikator (program dan keuangan). Nilai didapatkan dari aplikasi my Interest yang diterbitkan tiap bulan
		1.9 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	79%	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran
		1.10 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91,3%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)=Keterangan:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521111, 521211, 521219, 521811, 522111, 522131, 522141, 522162, 522191, 524114, 524119, 525112, 525113, 525115, 526112, 532111.
		1.11 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	86,25	Penilaian dilakukan oleh Biro Keuangan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif	1.12 Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	96%	$\left(\left(\text{Pegawai yang melaporkan SPT/Aparatur Negara tidak wajib LHKPN} \right) \times 100\% \right) + \left(\left(\text{Pegawai yang melaporkan LHKPN/Aparatur negara wajib LHKPN} \right) \times 100\% \right) / 2$
		1.13 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	62%	Aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk (SP4N-LAPOR!)
		1.14 Persentase Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25%	(Temuan yang ditindaklanjuti/Jumlah temuan) x 100% Penugasan khusus terdiri dari Audit Investigatif, ADTT, dan penugasan khusus lainnya

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

3.1 Hasil yang Telah Dicapai

Pada Triwulan II dilakukan revisi DIPA ke-5 dalam rangka Revisi Penajaman Anggaran berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal nomor 99/SJ-IND/PR/IV/2026 tanggal 13 April 2026 Hal Penajaman Belanja Kementerian Perindustrian TA 2026 yang terbit pada tanggal 28 April 2026. Kemudian dilanjutkan dengan Revisi ke-6 perihal pemutakhiran belanja operasional dan belanja perjalanan dinas yang terbit pada tanggal 11 Mei 2026.

Kegiatan Inspektorat Jenderal pada triwulan II ini merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan sebelumnya. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan triwulan II Tahun 2026 (Januari-Juni) mencapai Rp14.400.440.607,- atau 61,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp32.763.520.000,- (berdasarkan data MyIntress Kemenkeu Per 30 Juni 2026).

Realisasi pagu anggaran yang tercantum dalam Laporan Ketersediaan Dana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pagu Efektif

Unit Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Dana Tersedia (Efektif)	
		Keuangan (Rp.)	%	J u m l a h (Rp)	%
Inspektorat I	369.375.000	355.301.571	96,19	14.073.429	3,81
Inspektorat II	400.661.000	327.073.762	81,63	73.587.238	18,36
Inspektorat III	407.145.000	388.617.418	95,45	18.527.582	4,55
Inspektorat IV	439.721.000	311.607.265	70,86	128.113.735	29,13
Sekretariat Inspektorat Jenderal	30.770.120.000	19.613.218.781	63,74	11.156.901.219	36,26
Inspektorat Investigasi	376.498.000	276.061.827	73,32	100.436.173	26,67
Total	32.763.520.000	21.271.880.624	64,93	11.491.639.376	35,07

Sedangkan realisasi anggaran per unit kerja dan realisasi per jenis belanja anggaran di Inspektorat Jenderal Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Inspektorat Jenderal

Unit Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia (Efektif)	
		Keuangan (Rp.)				J u m l a h (Rp)	%
Inspektorat I	369.375.000	355.301.571	96,19	-	-	14.073.429	3,81
Inspektorat II	400.661.000	327.073.762	81,63	-	-	73.587.238	18,36
Inspektorat III	407.145.000	388.617.418	95,45	-	-	18.527.582	4,55
Inspektorat IV	439.721.000	311.607.265	70,86	-	-	128.113.735	29,13
Sekretariat Inspektorat Jenderal	30.770.120.000	19.613.218.781	63,74	-	-	11.156.901.219	36,26
Inspektorat Investigasi	376.498.000	276.061.827	73,32	-	-	100.436.173	26,67
Total	32.763.520.000	21.271.880.624	64,93	-	-	11.491.639.376	35,07

Tabel 7 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	23.332.269.000	14.400.440.607	61,72	-	-	8.931.828.393
2	52 Belanja Barang	8.273.201.000	5.722.103.777	69,16	-	-	2.551.097.223
3	53 Belanja Modal	1.158.050.000	1.149.336.240	99,25	-	-	8.713.760
Jumlah		32.763.520.000	21.271.880.624	64,93	0	0	11.491.639.376
Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto							
Sumber Data: Myintress per 30 Juni 2026							

3.2 Analisa Capaian Kinerja

Tabel 8 Target dan Realisasi Output Inspektorat Jenderal Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	31 Unit	31 Unit	35 Unit	-	-	-	-	-	-
2	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	193 Unit	48 Unit	14 Unit	48 Unit	-	48 Unit	-	49 Unit	-
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	4 Layanan	-	3 Layanan	-	5 Layanan	-
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-
5	Layanan Manajemen SDM Internal	137 Orang	35 Orang	5 Orang	34 Orang	-	34 Orang	-	34 Orang	-
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal Sekretariat Ijjen	13 Dokumen	4 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat I	105 Dokumen & Laporan	27 Dokumen & Laporan	12 Dokumen & Laporan	26 Dokumen & Laporan	-	26 Dokumen & Laporan	-	26 Dokumen & Laporan	-
8	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat II	36 Dokumen & Laporan	9 Dokumen & Laporan	-	9 Dokumen & Laporan	-	9 Dokumen & Laporan	-	9 Dokumen & Laporan	-
9	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat III	126 Dokumen & Laporan	32 Dokumen & Laporan	56 Dokumen & Laporan	32 Dokumen & Laporan	-	31 Dokumen & Laporan	-	31 Dokumen & Laporan	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
10	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat IV	16 Dokumen & Laporan	4 Dokumen & Laporan	1 Dokumen & Laporan	4 Dokumen & Laporan	-	4 Dokumen & Laporan	-	4 Dokumen & Laporan	-
11	Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektorat Investigasi	13 Dokumen & Laporan	4 Dokumen & Laporan	0 Dokumen & Laporan	3 Dokumen & Laporan	-	3 Dokumen & Laporan	-	3 Dokumen & Laporan	-

*) Berdasarkan data Capaian Output

Adanya Perbedaan realisasi dengan target disebabkan karena:

1. Relaksasi anggaran sehingga terdapat dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan
2. Terdapat perubahan rencana kegiatan

Tabel 9 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,45	Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada triwulan ini adalah sebagai berikut: - Follow Up permintaan dokumen pemeriksaan BPK; - Pelaksanaan Revaluasi BMN sampai tindak lanjutnya - Koordinasi ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara); - tindak lanjut saldo dekon dan pemutakhirannya; - Pre Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 oleh BPK-RI;

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II
				- Hasil penilaian Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester II Tahun 2026.
		Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU	62	- Penyusunan laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2026; - Koordinasi Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2025; - Penyelesaian Saldo Temuan Inspektorat Jenderal.
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *) IKU	20	Persentase perolehan tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian di peroleh di akhir tahun anggaran. Sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan beberapa kegiatan penunjang diantaranya evaluasi penilaian ZI dan Penyampaian usulan satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM tahun 2026.
		Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	Penilaian SAKIP Eselon I kementerian Perindustrian telah dilakukan pada bulan April 2026. Dari penilaian tersebut, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai sebesar 83,35. Unsur pendukung penilaian tersebut Adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	81,4	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2026. kegiatan untuk mendukung ketercapaian indikator, yaitu pengunggahan dokumen/sertifikat hasil pelaksanaan diklat pegawai, kesesuaian formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan dan kedisiplinan pegawai.
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	73	Nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian Perindustrian diselenggarakan di Triwulan III. Kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan I adalah Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II
				Inspektorat Jenderal, penataan arsip dan pemindahan arsip aktif dan arsip personal file dari ruangan TU ke ruangan central file.
		Tingkat Penerapan SPBE	78	Tingkat penerapan SPBE diselenggarakan di Triwulan III. Kegiatan penunjang Nilai penerapan SPBE Adalah pengisian LKE SPBE yang telah diterapkan di masing-masing Unit Kerja.
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	93,4	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal belum diperoleh nilainya sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 91,24%. Nilai tersebut bersifat Fluktuatif hingga akhir tahun anggaran. Kegiatan pendukung nilai tersebut adalah penginputan Capaian Output, deviasi halaman 3 DIPA, Penyerapan Anggaran
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	79	Pelaksanaan Survey Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal akan diselenggarakan di Triwulan IV. Capaian kinerja yang dilakukan adalah Pengadaan Sarana Penunjang kegiatan perkantoran berupa kursi kerja sebanyak 12 unit, penyewaan barang operasional.
		Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal	91,3	Pada Triwulan II capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Itjen sebesar 76,82%. Pengadaan Peralatan Audio Penunjang kegiatan perkantoran berupa Speaker Portable, pengadaan Audio Visual Penunjang kegiatan Perkantoran berupa Smart TV, Pengadaan Jasa Pemeliharaan Ruang Kerja, Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Dispenser, Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Alat Penyedot Debu.
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	86,25	Hasil Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan akan terbit di Triwulan IV. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu penyusunan Laporan Keuangan dan BMN TA 2025 Unaudited

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II
	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang Efektif	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	96	Hasil pegawai di lingkungan Kemenperin yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) belum dapat dihitung. Kegiatan yang dilakukan di Triwulan I adalah monitoring dan menyusun rekapitulasi pegawai wajib lapor LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN dan monitoring serta menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT Tahunan.
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!	62	Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang Indikator SP4N Lapor Adalah melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring, dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Tahun 2026 dan menyusun laporan pengelolaan SP4N-LAPOR! Triwulan II Tahun 2026.
		Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25	Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian, melaksanakan Audit Investigasi dan Audit lain sesuai instruksi Menteri atau Inspektur Jenderal, melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi dan melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2026 terdapat beberapa hal perbedaan dalam indikator kinerja dibandingkan dengan tahun 2025. Beberapa Indikator mengalami perubahan dan terdapat penambahan indikator baru. Perjanjian Kinerja tersebut sebagai berikut:

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2026

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi TW II	Keterangan
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU)	0,45%	Nilai Batas toleransi temuan material eksternal yang dilakukan oleh BPK belum terbit.	
		2	Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU)	62%	Capaian per 30 Juni 2026 sebesar 48,85%	
		3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU)	20%	Kegiatan pendukung indikator ini masih dalam proses pelaksanaan. Beberapa diantaranya adalah evaluasi penilaian ZI dan Penyampaian usulan satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM tahun 2026.	
		4	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	79,45	Penilaian SAKIP Eselon I telah dilaksanakan di Triwulan II. Adapun nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal sebesar 83,35	
		5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Nilai 81,4	Sampai dengan Triwulan II 2026, dilakukan kegiatan untuk mendukung ketercapaian indikator, yaitu pengunggahan dokumen/sertifikat hasil pelaksanaan diklat pegawai,	

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi TW II	Keterangan
					kesesuaian formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan dan kedisiplinan pegawai	
		6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal	Nilai 73	Penilaian Pengawasan Kearsipan belum dilaksanakan. Rencana pelaksanaan penilaian di Triwulan III 2026	
		7	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Nilai 78	Penilaian SPBE belum dilakukan di tahun 2026	
		8	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai 93,4	Nilai IKPA di Triwulan II sebesar 91,24%	
		9	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	79%	Survey kepuasan dukungan manajemen akan dilaksanakan di Triwulan IV.	
		10	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal	91,3%	Capaian per 1 Juli 2026 sebesar 76,82%. Hasil akhir akan diperoleh di akhir tahun anggaran.	
		11	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai 86,25	Indikator penilaian dan analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal dapat diperoleh nilainya di Triwulan IV.	

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi TW II	Keterangan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif	12	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	96%	Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah menyampaikan LHKAN sebesar 99,38%. Angka tersebut diperoleh dari Laporan LHKAN dimana terdapat Aparatur Negara yang wajib LHKAN sebanyak 394 Orang dan Tidak Wajib LHKPN sebanyak 6.932 Orang.	
		13	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	62%	Pada periode 1 April s.d. 30 Juni Tahun 2026, terdapat sebanyak 14 (empat belas) laporan yang masuk, terverifikasi dan terdisposisi melalui SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian. Terdapat 12 (dua belas) laporan yang masuk langsung kepada unit internal, 3 (tiga) laporan yang diteruskan dari aduan melalui SetWapres, dan 4 (empat) laporan yang tertunda/diarsipkan. Jenis laporan yang diterima selama periode 1 April s.d. 30 Juni 2026 dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Aspirasi : 6 Laporan b. Pengaduan Berkadar Pengawasan: 0 Laporan c. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan: 5 Laporan	

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi TW II	Keterangan
					d. Permintaan Informasi: 6 Laporan e. Whistleblowing System: 0 Laporan f. Tunda: 1 Laporan g. Arsip: 3 Laporan Tidak Diklasifikasi: 12 Laporan	
		14	Persentase atas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	80,25%	Persentase Penugasan Khusus yang ditindaklanjuti pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 88%.	

*Keterangan :



= Masih dalam tahap proses



= Target telah tercapai



= Tidak mencapai target

Kegiatan pada triwulan II yang telah dilaksanakan pada April hingga Juni 2026 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan

- Rapat Internal Terbatas Bersama Menperin dengan Agenda Lanjutan Pembahasan RUU Kawasan Industri;
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Tindaklanjut Surat dari Menteri Lingkungan Hidup;
- Menghadiri Launching dan Diskusi Buku Ginandjar Kartasasmita "Pengabdian dari Masa ke Masa, Perjalanan, Pergulatan dan Pemikiran", serta Syukuran Ulang Tahun ke-85 Bapak Ginandjar Kartasasmita;
- Menghadiri Undangan Pengukuhan *The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA)*;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Anggaran dan Program Prioritas Unit Kerja;
- Rapat Internal Terbatas dengan Agenda Pembahasan terkait Surat dari Kepala Badan Industri Mineral Perihal Izin Prakarsa Penyusunan RPP tentang Tata Kelola Mineral Logam Tanah Jarang, Mineral Radioaktif dan mineral lainnya yang terkait dengan Industri Pertahanan (tindaklanjut disposisi Bapak Menteri);
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Lanjutan Pembahasan terkait Biaya Layanan (PNBP);
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Dokumen *World Bank* dengan Judul "*Industrial Policy in the Digital Age*";
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Perubahan atas Permenperin No. 25 Tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Penyiapan Usulan Program/Skema Perlindungan Industri Dalam Negeri;
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Lanjutan Pembahasan terkait Biaya Layanan (PNBP);
- Menghadiri Peresmian Gedung Perkantoran Balai Peremberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK);
- Pertemuan Rencana *Pilot Project* Penggunaan Teknologi Pengolahan Air Baku dan Air Limbah Secara Terpadu dan Sirkular di Kawasan Industri dan Penandatanganan MoU;
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Persiapan Innoprom 2026;

Kegiatan pada triwulan I yang telah dilaksanakan pada April hingga Juni 2026 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan

- Rapat Internal Terbatas Bersama Menperin dengan Agenda Lanjutan Pembahasan RUU Kawasan Industri;
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Tindaklanjut Surat dari Menteri Lingkungan Hidup;
- Menghadiri Launching dan Diskusi Buku Ginandjar Kartasasmita "Pengabdian dari Masa ke Masa, Perjalanan, Pergulatan dan Pemikiran", serta Syukuran Ulang Tahun ke-85 Bapak Ginandjar Kartasasmita;
- Menghadiri Undangan Pengukuhan *The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA)*;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Anggaran dan Program Prioritas Unit Kerja;
- Rapat Internal Terbatas dengan Agenda Pembahasan terkait Surat dari Kepala Badan Industri Mineral Perihal Izin Prakarsa Penyusunan RPP tentang Tata Kelola Mineral Logam Tanah Jarang, Mineral Radioaktif dan mineral lainnya yang terkait dengan Industri Pertahanan (tindaklanjut disposisi Bapak Menteri);
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Lanjutan Pembahasan terkait Biaya Layanan (PNBP);
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Dokumen *World Bank* dengan Judul "*Industrial Policy in the Digital Age*";
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Perubahan atas Permenperin No. 25 Tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Penyiapan Usulan Program/Skema Perlindungan Industri Dalam Negeri;
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Lanjutan Pembahasan terkait Biaya Layanan (PNBP);
- Menghadiri Peresmian Gedung Perkantoran Balai Peremberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK);
- Pertemuan Rencana *Pilot Project* Penggunaan Teknologi Pengolahan Air Baku dan Air Limbah Secara Terpadu dan Sirkular di Kawasan Industri dan Penandatanganan MoU;
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Persiapan Innoprom 2026;

- Rapat Internal Terbatas Bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Laporan mengenai SNI Besi dan Baja;
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Evaluasi Permenperin SNI;
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan "Reformatting Organisasi".
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan terkait Perkembangan Transformasi Industri Hijau (Tindaklanjut Disposisi Bpk. Menperin);
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan Jabatan Kosong dan Proyeksi Kosong di Lingkungan Kemenperin;
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Lanjutan Pembahasan terkait Biaya Layanan (PNBP);
- Rapat Internal Terbatas bersama Menperin dengan Agenda Pembahasan terkait Inpres Industri Semikonduktor;
- Pertemuan bersama Sekjend dengan Agenda Tindak Lanjut Hasil Konsinyering dengan Komisi VII DPR R.I.;
- Rapat Koordinasi Penyelesaian Masalah *e-Licensing* Dit. Industri Logam;
- Mendampingi Menperin pada Agenda Kuliah Umum Kepada Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX TA 2026 Lemhanas RI;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Perubahan Permenperin tentang Pembagian Kewenangan Pembinaan Industri;
- Mendampingi Menperin pada Agenda Pertemuan dengan Pengurus Gaikindo;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Finalisasi Persiapan Innoprom 2026.

1.2 Kegiatan Pengawasan

• Inspektorat I

- Evaluasi SAKIP pada Eselon II BPSDMI, UPT BPSDMI, dan Sekretariat Jenderal;
- Reviu Revisi Penajaman Belanja Sekjen TA 2026;
- Reviu Revisi Belanja BPSDMI TA 2026;
- Melaksanakan Audit Eselon II BPSDMI TA 2025;
- Evaluasi zona integritas untuk satuan kerja IFPK Kendal, BDI Makasar, BDI Padang, BDI Surabaya, BDI Denpasar, BDI Yogyakarta, dan SMK SMTI Banda Aceh;
- *Focus Group Discussion* dengan satuan kerja SMTI Jakarta, Politeknik STTT Bandung, dan Politeknik Petrokimia Banten;
- Melakukan Rapat Internal Evaluasi Kegiatan Inspektorat I bulan April;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN pada Eselon II BPSDMI;
- Reviu Dokumen Data Dukung Revisi BPSDMI TA 2026.

- **Inspektorat II**

- Melaksanakan dan Membantu Pelaksanaan Audit Tematik pada Sasaran Program Tumbuh dan Berkembangnya Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang Inklusif di Ditjen IKMA TA 2025;
- Reviu Revisi DIPA Ditjen IKMA TA 2026 dan Ditjen ILMATE TA 2026;
- Mengikuti Rapat Pembahasan Identifikasi kerja Sama Bilateral dalam Rangka IPC INNOPROM;
- Melaksanakan Reviu Perubahan RKBMN TA 2026 pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo;
- Pelaksanaan Revisi Anggaran Inspektorat II, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 727/IJ-IND.1/PR/IV/2026;
- Rapat Koordinasi dan Penugasan Tim Pengawas Kearsipan Internal Lokus Unit Pusat Tahun 2026;
- Mengikuti Rapat Teknis Kegiatan Fasilitasi Pembahasan Rincian Komponen Utama Sektor ILMATE;
- Menghadiri kegiatan Peresmian Gedung Perkantoran BPIFK pada tanggal 8 Mei 2026;
- Menghadiri rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2025;
- Penyusunan KAK dan RAB dalam rangka Usulan Kegiatan Inisiatif Baru Inspektorat II tahun 2027;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan II Tahun 2026 (Periode B18);
- Menghadiri Rapat pembahasan perkembangan kerja sama Bilateral Bidang Industri dan Agenda Penandatanganan pada INNOPROM 2026;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Penerapan Bantuan Pembelian KBLBB Roda Dua;
- Menghadiri Rapat Pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 untuk Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP);
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Pertemuan Bilateral Menteri Perindustrian pada INNOPROM 2026;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Keberlangsungan Layanan Kolokasi Data Center Sistem CEIR;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Pengujian Jenis Baterai KBLBB;
- Menghadiri Rapat Lanjutan Pembahasan Usulan Revisi Permenperin No. 38 Tahun

2024 dan Permenperin No. 29 Tahun 2019;

- Menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut *Green Book* Proyek Pinjaman Luar Negeri;
- Menghadiri Koordinasi Lanjutan Keberlangsungan Layanan Kolokasi Data Center Sistem CEIR;
- Menghadiri Pertemuan Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan Kirov Region Republik Federasi Rusia;
- Menghadiri Rapat Lanjutan Pembahasan Usulan Revisi Permenperin No. 38 Tahun 2024;
- Mengikuti Rapat Pembahasan DIM Rancangan Permenperin tentang Pengelolaan CEIR;
- Mengikuti Rapat Pemantauan Pemenuhan Dokumen Dalam Rangka Pemeriksaan BPK;
- Mengikuti Rapat Pembahasan Rencana Penerapan Program Bantuan Pembelian KBLBB Roda Dua;
- Mengikuti Rapat Pembahasan dan Pemaparan Administratif PT Apple Indonesia;
- Mengikuti Rapat Diskusi Terkait Dokumen Pertimbangan dalam Rangka Usulan Persetujuan Hibah BMN yang akan Diserahkan ke ITB;
- Menghadiri Rapat Pleno dan Ekspos Evaluasi AKIP Unit Eselon I Kemenperin;
- Mengikuti Rapat Pembahasan Terkait Pemenuhan Program LCEV;
- Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengikuti Bimtek Kearsipan Bagi Arsiparis;
- Mengikuti Bimtek Pengelolaan Informasi Publik;
- Mengikuti Rapat Sosialisasi PKPT dan Kebijakan Pengawasan Kearsipan Nasional;
- Menghadiri *Kick Off* Halal Indo;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Keberlangsungan Layanan Kolokasi Data Center Sistem CEIR;
- Menghadiri Undangan Pertemuan Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan Kaluga Region Republik Federasi Rusia;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah untuk Pagu Anggaran RAPBN 2027;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Pertemuan Bilateral Menteri Perindustrian pada INNOPROM 2026;
- Melaksanakan Reviu Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera TA 2026;
- Menghadiri Rapat Pleno Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Lokus Unit Pusat

Tahun 2026;

- Menghadiri Undangan Rapat dan Diskusi Identifikasi Calon Mitra Potensial untuk *Business Matching* Industri Indonesia pada INNOPROM 2026;
- Menghadiri Undangan Undangan Rilis IKI Bulan Juni 2026;
- Menghadiri Pertemuan Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan Chelyabinsk Region Republik Federasi Rusia.

• **Inspektorat III**

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Unit Kerja Eselon I Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
- Reviu Penajaman Belanja Kementerian Perindustrian TA 2026 pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III.
- Pelaksanaan Audit Kinerja pada BBSPJIKFK dan BSJI Jakarta;
- Pelaksanaan Reviu Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2026 pada BSPJI Selulosa dan BSPJI Pontianak;
- Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran TA 2026 pada Pusat Data dan Informasi;
- Pelaksanaan Reviu Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2026 pada BSPJI Selulosa dan BSPJI Pontianak.

d. Inspektorat IV

- Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi AKIP Eselon II pada Unit Pengawasan Inspektorat IV TA 2025;
- Pelaksanaan Kegiatan Survey Lapangan Audit Kinerja pada Ditjen IKFT TA 2025;
- Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Substansi Audit Kinerja dan Audit Kepatuhan pada Ditjen IKFT TA 2025;
- Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi AKIP Eselon II pada Unit Pengawasan Inspektorat IV TA 2025;
- Pelaksanaan Kegiatan Survey Lapangan Audit Kinerja pada Ditjen IKFT TA 2025;
- Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Substansi Audit Kinerja dan Audit Kepatuhan pada Ditjen IKFT TA 2025;
- Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Audit Kinerja pada Ditjen Industri Agro TA 2025.

e. Inspektorat Investigasi

- Audit Dengan Tujuan Tertentu IMEI Pada Direktorat IET;
- Audit Dengan Tujuan Tertentu Pertimbangan Teknis Impor Baja Pada Direktorat Industri Logam;

- Monev Pengadaan melalui *e-Catalogue* Pada Sekjen, PPIH, STMI Jakarta, dan BPSDMI;
- Tindak Lanjut Hasil ADTT Pada SMK-SMAK Makassar dan BPSDMI;
- Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai;
- Pengawasan Mutasi Pegawai ke Instansi Lain;
- Menghadiri Pemusnahan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Bidang Perindustrian Berupa Alat Pemadam Api *Portable*;
- Mengikuti Bimtek Kearsipan Bagi Arsiparis;
- Penyusunan Laporan PP39 Triwulan I TA 2026;
- Revisi Penajaman Anggaran Belanja;
- Koordinasi Pengawasan Kearsipan Internal dengan Biro Umum;
- Pengawasan Lanjutan IMEI di Kementerian Perindustrian;
- ADTT Tata Kelola Pertimbangan Teknis Impor Baja Pada Direktorat Industri Logam;
- Monev Pengadaan melalui *e-Catalogue* Pada Pusat Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Ilmate, BBIA dan AKA Bogor, Pusat BSKJI, BBSPJKB, BDI Yogyakarta, dan SMK-SMTI Yogyakarta ;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Identifikasi Masalah dan Analisis Isu Permasalahan Penanganan dan Antisipasi Aktivitas Ormas yang Mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- Verifikasi Lapangan Pengawasan Kearsipan Internal Lokus Unit Pusat Tahun 2026 Pada Biro OSDM;
- Audit Lanjutan Pengelolaan IMEI di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Audit Dengan Tujuan Tertentu Tata Kelola Pertimbangan Teknis Impor Baja Pada Direktorat Industri Logam (Lanjutan);
- Monev Pengadaan melalui *e-Catalogue* Pada SMA-SMAK Bogor;
- Menghadiri *Kick Off* Halal Indo;
- Menghadiri Undangan Undangan Rilis IKI Bulan Juni 2026;
- Menghadiri Rapat Pleno Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Lokus Unit Pusat Tahun 2026;
- Menyusun Capaian Output Inspektorat Investigasi bulan Juni 2026;
- Verifikasi Lapangan Pengawasan Kearsipan Internal Lokus Unit Pusat Tahun 2026 Pada Direktorat Industri Agro;
- Menyusun RAB dan Satuan 3B dalam rangka usulan kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2027;
- Investigasi Hasil Pengawasan dan Penerbitan Sertifikasi TKDN MAPR;
- Rapat Pembahasan Penilaian SPIP Tahun 2026;

- Menyusun Revisi POK Ketujuh Inspektorat Investigasi;
- Menghadiri Sosialisasi Pengawasan JPH.

1.3 Kegiatan Dukungan Pengawasan

- a. Penyusunan laporan yang diselesaikan di Triwulan II Tahun 2026 adalah Laporan Kinerja Eselon I dan II Inspektorat Jenderal Tahun 2025, Laporan PP39 Triwulan II Tahun 2026 Unit Eselon I dan II Inspektorat Jenderal, Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026, , Laporan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal bulan April, Mei dan Juni.

- b. Pengembangan SDM

Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan II (April - Juni) adalah sebagai berikut:

- Penyusunan SOP Barang Persediaan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- Pendaftaran Ujian Auditor Ahli Madya a.n. Mohammad Adhi Rachmaidi;
- Pendaftaran Ujian Auditor Ahli Pertama a.n. Bagas Unggul Yudanta;
- Pengadministrasian Kepegawaian antara lain: Pembuatan Jadwal WFA Bulan April 2026, Rekapitulasi Tunkin Bulan Maret s.d. April 2026, Pembuatan Rekap Data Kenaikan Pangkat ASN ITJEN, Pembuatan Nota Dinas Kenaikan Pangkat Pegawai Periode Bulan Juli 2026, Pengumpulan SKP TW I Tahun 2026 di lingkungan Inspektorat Jenderal, Rekonsiliasi Tunggakan BPJS Kesehatan a.n. Yusup;
- Pembuatan Surat Pembatalan Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama ke BPKP;
- Kenaikan Pangkat Bulan a.n. Giry Rachman, Ira Sukmayanti, Rika Betty;
- Pembuatan KGB a.n. Irman Setiyadi;
- Pengurusan Pensiun a.n. Emil Satria;
- Pengurusan PAK Jabatan Fungsional;
- Pembuatan Perubahan Pertama SK *Reward and Punishment* di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- Usulan mengikuti diklat Penjenjangan Auditor Ahli Muda a.n. Dian Ayu Pertiwi dan Zuan Andri Wijayanto;
- Pendaftaran Uji Kompetensi Analis SDM Aparatur Ahli Pertama a.n. Aditya Ngesti Utomo;
- Pengusulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS di lingkungan Inspektorat Jenderal;

- Pengadministrasian Kepegawaian antara lain: Pembuatan Jadwal WFH Bulan Juni 2026, Pengurusan Cuti Bulan Mei 2026, Pengurusan BPJS Kesehatan a.n. Liliek Widodo, Emil Satria dan Agus Saryanto;
- Mengikuti Sosialisasi Taspen Tahun 2026;
- Pembuatan KAK dan RAB Tahun 2027;
- Penyusunan Pedoman Telaah Sejawat;
- Penyusunan Edaran tentang Fleksibilitas Jam Kerja dan Tata Cara Perbaikan Absen;
- Pemberian Masukan pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang Budaya Kerja BerAKHLAK;
- Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Biro Hukum, Kementerian Perindustrian;
- Pengadministrasian kepegawaian antara lain: Pembuatan ND Persetujuan Magang dari Universitas Bina Sarana Informatika, Pembuatan ND Pemutakhiran Data BPJS Kesehatan, Pembuatan ND Usulan Uji Kompetensi Arsiparis a.n. Andy Sebastian Tanasha, Pembuatan Paklaring a.n. Dara Ayu Fahira Rukmana;
- Membuat Draf Peraturan Pedoman Audit Investigasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- Finalisasi Pedoman Telaah Sejawat di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- Pembuatan Surat Usulan Pegawai untuk 2027 KOICA Scholarship Program;
- Pelaksanaan Serah Terima Jabatan Inspektur I dan IV;
- Usulan Pensiun a.n. Ir. Emil Satria, M.Si.;
- Usulan Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani a.n. Mokhammad Subuh Washardito;

Penyusunan Surat Keputusan (SK)

- Pembentukan Koordinator/Tim Pelaksana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
- Pembentukan Tim Penerapan dan Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
- Perubahan Pertama Keplrjen Nomor 05 Tahun 2026 ttg Penunjukan Ketua dan Anggota Tim Kerja Pelaksana Kegiatan di Lingk Sekretariat Itjen;
- Penyusunan Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

c. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Evaluasi Hasil Pengawasan;

- Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan BPK-RI;
- Menyelenggarakan Rapat Persamaan Persepsi Evaluasi AKIP Tingkat Unit Kerja Eselon I Tahun 2026;
- Menyelenggarakan Rapat Pleno Hasil Evaluasi AKIP Tingkat Unit Kerja Eselon I Tahun 2026;
- Menyelenggarakan Rapat Ekspos Hasil Evaluasi AKIP tingkat Unit Kerja Eselon I Tahun 2026, Hasil Ekspos SAKIP dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 11 Hasil Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian Tahun 2026

No	Unit Kerja	Nilai Per Komponen				Nilai AKIP
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Inspektorat Jenderal	24,60	25,20	13,05	20,50	83,35
2	BSKJI	24,30	26,10	12,30	20,50	83,20
3	Ditjen IKMA	25,20	24,60	12,30	20,50	82,60
4	Sekretariat Jenderal	25,20	23,70	13,05	20,50	82,45
5	Ditjen IA	23,70	24,60	12,75	20,50	81,55
6	Ditjen ILMATE	24,00	24,60	11,70	20,50	80,80
7	Ditjen KPAIL	23,10	24,60	12,30	20,50	80,50
8	BPSDMI	22,80	24,30	12,30	20,50	79,90
9	Ditjen IKFT	22,20	24,60	12,30	20,50	79,60

- Pemantauan Pengisian Aplikasi SAKIP2 Terhadap Seluruh Tim Pembangun Implementasi AKIP Unit Kerja Eselon I;
- Menghadiri Rapat Klarifikasi Hasil Pemeriksaan Intern maupun Ekstern Dalam Rangka Penerbitan Surat Bebas Temuan Salah Satu Pegawai BPSDMI;
- Mengkompilasi Nilai Akhir AKIP Tingkat Unit Kerja Eselon I Tahun 2026;
- Menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi AKIP Tingkat Unit Kerja Eselon I Tahun 2026;
- Menghadiri Rapat Evaluasi SOP Perjadin Dalam Negeri Ditjen IKFT dan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Inspektorat Jenderal 2015-2024;
- Menyiapkan Jawaban atas Pertanyaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Dalam Rangka Diskusi/Konsultasi Publik Pengumpulan Data dan Informasi Pemantauan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2014;

- Mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern dan Pemeriksaan BPK-RI;
- Mengkoordinasikan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada Biro Umum;
- Menyelenggarakan *Entry Meeting* Penugasan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Triwulan II Tahun 2026 pada Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025;
- Menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit Pada Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2023 dan 2024;
- Pemenuhan Permintaan Data Monitoring Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP;
- Menyiapkan Data Status Temuan Internal dan Eksternal Satker Pembangunan Zona Integritas;
- Menghadiri Undangan BPKP Dalam Rangka Monitoring Peningkatan Kapabilitas APIP di Gedung BPKP Pusat;
- Menghadiri Rapat Pra Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Teknis dan Pengaduan Masyarakat oleh APIP pada Pemerintah Daerah;
- Mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern, Pengawasan BPKP, dan Pemeriksaan BPK-RI;
- Menyusun Masukan serta Evaluasi atas Kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi Pemanfaatan *User Spesific Duty Free Scheme (USDFS)* dalam rangka *Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA)*;
- Menghadiri Pembinaan SPIP pada Kementerian Perindustrian di Gedung Pusat BPKP;
- Menghadiri *Entry Meeting* Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat;
- Menghadiri Sosialisasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Penilaian SPIP pada Unsur Ketaatan;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
- Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal;
- Pengumpulan dan Pengunggahan Data Dukung Pemenuhan SPIP Inspektorat Jenderal;
- Menghadiri Rapat Evaluasi Pemeriksaan Laporan Keuangan BLU Tahun 2025 oleh Kantor Akuntan Publik.

d. Pengawasan dan Analisa Pengawasan

- Melaksanakan Sosialisasi Pembangunan dan Evaluasi ZI Tahun 2026;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Penilai Internal ZI dan Entry Meeting Evaluasi ZI Tahun 2026;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kemenperin;
- Mengikuti Rapat Koordinasi Aksi Penguatan Tata Kelola Impor;
- Mengikuti Rapat Koordinasi Aksi 14 Penguatan Konflik Kepentingan;
- Mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pembentukan ULSW dan Implementasi ISRM di Kementerian Perindustrian;
- Penyusunan Konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Perubahan Pertama Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 29 Tahun 2026 tentang Tim Penilai Internal Zona Integritas Kementerian Perindustrian Tahun 2026;
- Analisa Dokumen Awal Satuan Kerja yang akan dilakukan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2026;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Klarifikasi Penilaian dan Konfirmasi Evaluasi ZI;
- Melaksanakan Klarifikasi dan Konfirmasi Evaluasi ZI terhadap 24 satker;
- Melaksanakan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 dan sosialisasi Teknis Pengusulan Zona Integritas Tahun 2026
- Mengikuti Rapat Pembahasan Pelaksanaan Aksi Stranas PK;
- Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil SPI 2025;
- Penyusun Jadwal dan Teknis Pelaksanaan Klarifikasi dan Konfirmasi Evaluasi ZI;
- Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan II Tahun 2026 (Periode B18);
- Menyusun konsep Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi Triwulan II Tahun 2026 (Periode B18);
- Menyiapkan dan menyusun konsep surat dan dokumen kelengkapan pengusulan satuan kerja berpedikat menuju WBK/WBBM Tahun 2026 kepada TPN Kementerian PANRB;
- Mengkoordinasikan penyusunan/pemilihan rencana aksi tindak lanjut hasil survei penilaian integritas (SPI) Kementerian Perindustrian tahun 2025 serta memproses persetujuan pimpinan;

- Melakukan input rencana aksi TL hasil e-SPI Tahun 2025 melalui laman spi.kpk.go.id;
 - Pemantauan capaian progres pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi periode B18 dan penyampaian laporannya melalui jaga.id;
 - Penyampaian usulan satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM tahun 2026 melalui laman <https://www.portalrb.id>;
 - Mengikuti *Kick Off Meeting* Evaluasi SAKIP dan ZI 2026;
 - Menyusun konsep Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
- e. Penyelesaian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2026, yaitu:
- Revisi Penajaman Anggaran berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal nomor 99/SJ-IND/PR/IV/2026 tanggal 13 April 2026 Hal Penajaman Belanja Kementerian Perindustrian TA 2026;
 - Pembahasan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional tahun 2026 dan 2027;
 - Rapat Sosialisasi Capaian Output Tahun 2026;
 - Menghadiri acara *Kick-Off* E-Monev Bappenas Generasi 4 Tahun 2026;
 - Menyusun Laporan PP39 Triwulan I Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - Pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat Jenderal;
 - Menyusun Matriks Monitoring Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2026 pada Inspektorat Jenderal;
 - Menghadiri undangan rapat terkait tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2026;
 - Mengadakan Rapat terkait Penajaman Belanja pada Inspektorat Jenderal Tahun 2026;
 - Pelaporan pelaksanaan Renja pada Aplikasi E-Monev Bappenas;
 - Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Saldo Rekomendasi pada Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - Penginputan Capaian Output Bulan April 2026 dan E-Monev Bappenas periode April 2026;
 - Menindaklanjuti saldo Rekomendasi pada Tim Program dan Evaluasi;
 - Menindaklanjuti LHE SAKIP pada Inspektorat Jenderal;
 - Revisi DIPA Inspektorat Jenderal ke 6 perihal pemutakhiran belanja operasional dan belanja perjalanan dinas;

- Penyusunan Renja Pagu Indikatif pada Aplikasi KRISNA sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 119/SJ-IND/PR/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 Hal Pagu Indikatif Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2027 dimana anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp35.040.251.000,-;
- Input data anggaran Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 pada Aplikasi SAKTI;
- Mengikuti Rapat Kebijakan Industri Nasional Pokja 1 dan Pokja 10;
- Mengikuti Rapat Penyusunan SKP;
- Mengikuti Rapat Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Menyelenggarakan Rapat koordinasi terkait saldo temuan pada Tim Program dan Evaluasi;
- Permintaan Dokumen Dalam Rangka Pemutakhiran Data Entitas Pemeriksaan BPK pada tim kerja Program dan Evaluasi;
- Pemenuhan Bukti Dukung Penilaian SPIP Tahun 2026 pada tim Program dan Evaluasi;
- Penyusunan Satuan 3B dan Rencana Kerja (Renja) pada aplikasi KRISNA berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 119/SJ-IND/PR/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 Hal Pagu Indikatif Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2027 dengan anggaran sebesar Rp35.040.251.000,- beserta usulan tambahan anggaran;
- Menyusun konsep bahan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Bersama dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Pembahasan terkait Standar Biaya Keluaran Umum dan Khusus dalam penganggaran tahun anggaran 2027.

f. Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal Triwulan II (April-Juni) Tahun 2026

Tabel 12 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2026

No	MAK/AKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Tanggal Kontrak	Tanggal BAST	Tanggal SP2D
1	EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Peralatan Audio Penunjang kegiatan perkantoran berupa Speaker Portable.	Rp 4,500,000	CV. Mauza Putra Berlian	6 April 2026	10 April 2026	5 Mei 2026
2	EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Peralatan Audio Visual Penunjang kegiatan Perkantoran berupa Smart TV	Rp 126,871,890	PT. Bumi Jasa Utama	9 April 2026	13 April 2026	29 April 2026
3	EBA.994.002.D.5231...	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Ruang Kerja Inspektorat Jenderal	Rp 72,747,180	PT. Darmo Atmojo Bersaudara	25 Mei 2026	2 Juni 2026	10 Juni 2026
4	EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan	Rp 6,426,900	PT. Sinergi Pro Kreasi	2 Juni 2026	4 Juni 2026	10 Juni 2026

No	MAK/IAKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Tanggal Kontrak	Tanggal BAST	Tanggal SP2D
		Perkantoran berupa Dispenser					
5	EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Alat Penyedot Debu	Rp 4,000,440	PT. Adi Sarana Armada Tbk.	15 Juni 2026	17 Juni 2026	
Total					Rp 172.262.070,-		

3.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tidak mengalami hambatan yang berarti. Namun, ada beberapa kendala yang dialami, yaitu:

- 1) Revisi anggaran yang terjadi beberapa kali;
- 2) Penyelesaian rekomendasi hasil tindak lanjut pengawasan internal yang masih perlu dioptimalkan mengingat di Triwulan II, diharapkan sebesar 50% saldo temuan telah ditindaklanjuti;

3.4 Langkah Tindak Lanjut

- a. Telah diserahkan segala dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses revisi kepada pihak DJA;
- b. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar realisasi dapat tercapai 60% pada Triwulan II;
- c. Menyelesaikan Saldo temuan Itjen segera sesuai rekomendasi yang dijelaskan;
- d. Masing-masing unit agar mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan baik dan bertanggungjawab.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2026 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 (Januari - Juni) mencapai Rp21.271.880.624,- atau sebesar 64,93% dari total pagu anggaran sebesar Rp32.763.520.000,-. Sisa anggaran sampai dengan Desember 2026 sebesar Rp11.491.639.376,- (berdasarkan MyIntress Kemenkeu Per 30 Juni 2026).

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum seluruhnya dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Diharapkan Informasi capaian kinerja Triwulan II dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2026 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN